

Judul : Kejar Target IKN Jadi Ibu Kota Politik, Otorita Minta Tambah Anggaran Rp 15,5 Triliun
Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

RENCANA ANGGARAN 2027

Kejar Target IKN Jadi Ibu Kota Politik, Otorita Minta Tambah Anggaran Rp 15,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS – Otorita Ibu Kota Nusantara mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp 15,5 triliun dari pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp 6,7 triliun pada tahun 2027. Penambahan anggaran itu diperlukan guna mengejar target pembangunan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Permintaan itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja Komisi II DPR membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, Kamis (11/6/2026), di Gedung Nusantara, Jakarta. Menurut dia, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan IKN batch (kelompok) kedua dan batch ketiga untuk kontrak jamak 2026-2028.

Otorita IKN sebelumnya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6,7 triliun untuk tahun 2027. Padahal, menurut Basuki, total kebutuhan anggaran Otorita IKN Rp 22,2 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk program pengembangan kawasan strategis. "Masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun yang terdiri dari

pembangunan batch kedua sebesar Rp 7,4 triliun dan batch ketiga mencapai Rp 8 triliun," katanya.

Menurut Basuki, penambahan anggaran ini dibutuhkan untuk mencapai target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Oleh karena itu, proses pembangunan ini menjadi perhatian dan diharapkan bisa terpenuhi.

Progres pembangunan

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Ridwan Karyayuda itu, Basuki juga melaporkan progres pembangunan IKN. Menurut dia, pada batch kedua ini, Otorita IKN tengah membangun gedung perkantoran legislatif dan yudikatif serta akses jalan menuju kawasan IKN Kompleks legislatif meliputi kantor MPR, DPR, dan DPD. Adapun kompleks yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Pada tahap ini dibangun juga embung, kolam retensi, dan jaringan pipa air bersih untuk kawasan IKN. Pembangunan



Pembangunan di kawasan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Minggu (17/5/2026). Pemerintah terus menuntaskan pembangunan di IKN.

dalam tahap ini dilakukan dalam kontrak tahun jamak 2025-2027 dengan kebutuhan anggaran Rp 20 triliun.

Adapun pembangunan batch ketiga, lanjutnya, membutuhkan anggaran Rp 17,2 triliun. Anggaran ini dialokasikan un-

tuk mendirikan gedung hunian vertikal bagi pimpinan, anggota, hingga anggota staf bidang legislatif dan yudikatif. Di samping itu, jalan dan akses menuju hunian kawasan tersebut serta kawasan diplomatik. Tahapan kontrak jamak 2026-2028 ini

juga mencakup pembangunan perpipaan.

Basuki menyebut prioritas Otorita IKN yang tercantum dalam rencana strategis tahun 2025-2029 mencakup dua kegiatan. Pertama, perencanaan tata ruang dan pembangunan

gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung pembangunan hunian serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas.

"Termasuk pembinaan ASN (aparatur sipil negara) ke IKN serta menyelenggarakan sistem pemerintahan," ujarnya.

Sementara kegiatan kedua terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, dan pengembangan kawasan ekonomi. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan, serta penanganan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN.

Efisiensi

Menanggapi usulan tersebut, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Khozin, meminta Otorita IKN berhati-hati dengan anggaran pembangunan. Jajaran Otorita IKN harus mencermati perhitungan anggaran karena saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.

"Anggaran ratusan triliun di tengah kebijakan efisiensi ini

mengeus dada kita kalau sampai mubazir begitu. Semua Kementerian, semua ekosistem kelembagaan, ini sudah mengikat pinggang," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, juga mengingatkan Otorita IKN untuk menjaga pembangunan secara berkesinambungan. Apalagi, belum semua pihak menginginkan pembangunan infrastruktur di IKN.

Kendati demikian, Komisi II DPR pada akhirnya menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan Otorita IKN. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta Otorita IKN untuk menyampaikan secara rinci program-program prioritas yang terdampak oleh efisiensi anggaran tahun 2027.

Dia juga meminta koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memperjuangkan usulan penambahan tersebut.

"Ini dengan tetap memperhatikan urgensi keberlangsungan program-program yang bersentuhan langsung dengan layanan publik dan proyek strategis nasional," kata Aria sebelum menutup rapat. (RTG)